

**PERAN KOMITE AUDIT DALAM PENGAWASAN PENERAPAN
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT KIMIA FARMA
(PERSERO) Tbk**

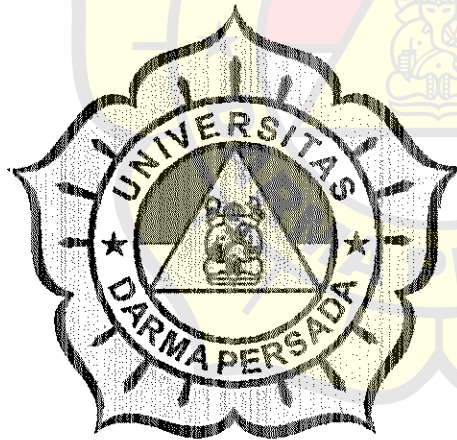
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademik dan Melengkapi Sebagian Dari
Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Oleh

Novita Sari

10420047



Fakultas Ekonomi

Universitas Darma Persada

Jakarta

2014

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Sari

No. Pokok : 2010420047

Jurusan/Peminatan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **PERAN KOMITE AUDIT DALAM PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk** yang dibimbing oleh Bapak Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak. MM adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan maupun mengkopi sebagian atau keseluruhan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 4 juli 2014.

Yang menyatakan,



Novita Sari

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Sari

No. Pokok : 2010420047

Jurusan : Ekonomi

Peminatan : Akuntansi

Judul Skripsi : **PERAN KOMITE AUDIT DALAM
PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan diujikan dalam sidang Ujian
Skripsi tanggal

Jakarta, 4 Juli 2014

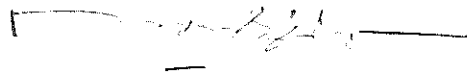
Mengetahui

Pembimbing I

Ketua Jurusan Akuntansi



(Atiek Isniawati, SE, Ak, M.Si)



(Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak. MM)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Sari
No. Pokok : 2010420047
Jurusan/Peminatan : Ekonomi/Auditing
Peminatan : Akuntansi
Judul Skripsi : PERAN KOMITE AUDIT DALAM PENGAWASAN
PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* PADA PT KIMIA FARMA (PERSERO)
Tbk

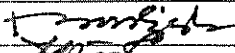
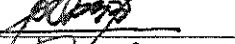

Telah diperiksa, dikaji dan diujikan dalam sidang Ujian Skripsi Sarjana tanggal 12 Agustus 2014 dengan hasil B

Jakarta,

Ketua Jurusan Akuntansi

(Atiek Isnawati, SE, Ak, M.Si)

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

No	Nama Penguji	Jabatan Menguji	Tanda Tangan
1	Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak. MM	Ketua penguji	
2	Jombrik, SE. MM	Anggota Penguji	
3	Atik Isnawati, SE. AK. Msi	Anggota Penguji	

Dekan Fakultas Ekonomi


(Jombrik, SE. MM)

ABSTRAK

Nim: 2010420047, **Judul:** Peran Komite Audit dalam Pengawasan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk

Jumlah Hal : xii+100 Halaman

Kata Kunci : Komite Audit, *Good Corporate Governance*

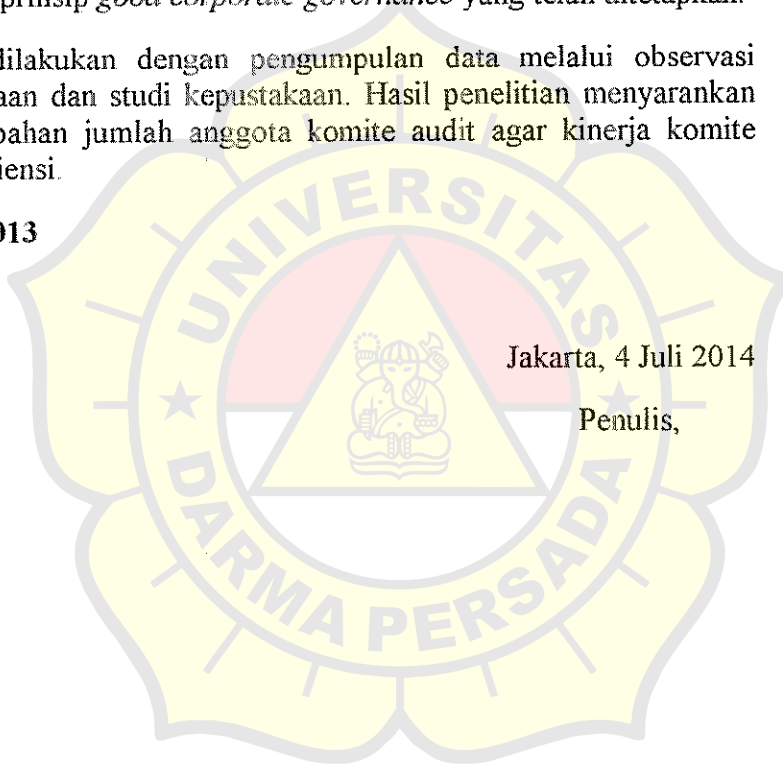
Menilai sejauh mana peran komite audit dalam pengawasan penerapan *good corporate governance* pada Kimia Farma yang bergerak di industri farmasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian praktik komite audit dalam pengawasan penerapan *good corporate governance* apakah telah memperhatikan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui observasi langsung pada perusahaan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan penambahan jumlah anggota komite audit agar kinerja komite audit menjadi lebih efisiensi.

Daftar Acuan: 1990-2013

Jakarta, 4 Juli 2014

Penulis,



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmatnya- Nya, Khususnya dalam penyusunan penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Komite Audit dalam Pengawasan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk**”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada Jakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan materil maupun moril dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua saya, Ayahanda, H. Sudanto, yang selalu memberi motivasi pada saat saya mulai putus asa Ibunda, Hj. Yuni Susilawati, yang telah sepenuh hati dan raga merawat dan mendukung saya hingga saat ini. Kakak dan Adikku (Devi Damayanti, SS dan M. Farhan dani) serta keluarga Elmira Azalia Prasetyo yang telah memberikan perhatian dan dukungan doa.
2. Bapak Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak. MM selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan dorongan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Atiek Isnawati, SE, Ak. M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada terima kasih atas ilmu yang diberikan dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswi Universitas Darma Persada, semoga bermanfaat.
5. Teman-teman akuntansi angkatan 2010 terima kasih atas kebersamaannya dan untuk sahabat-sahabat seperjuanganku Sisy, Vidya, Novita, Listyani, Mala, Tania, Rizki, Nabila, Lia, Rahman, Oktosi terima kasih banyak atas hari-hari yang sudah kita lewati bersama selama kuliah, selalu menjadi sahabat sejati yang selalu ceria, tertawa, dan selalu semangat.
6. Ricky, yang selalu menemani dan mendukung dalam proses pencarian data maupun saat penulisan skripsi.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan segala keterbatasan pemikiran dan kesederhanaan dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 4 Juli 2014

Novita Sari

DAFTAR ISI

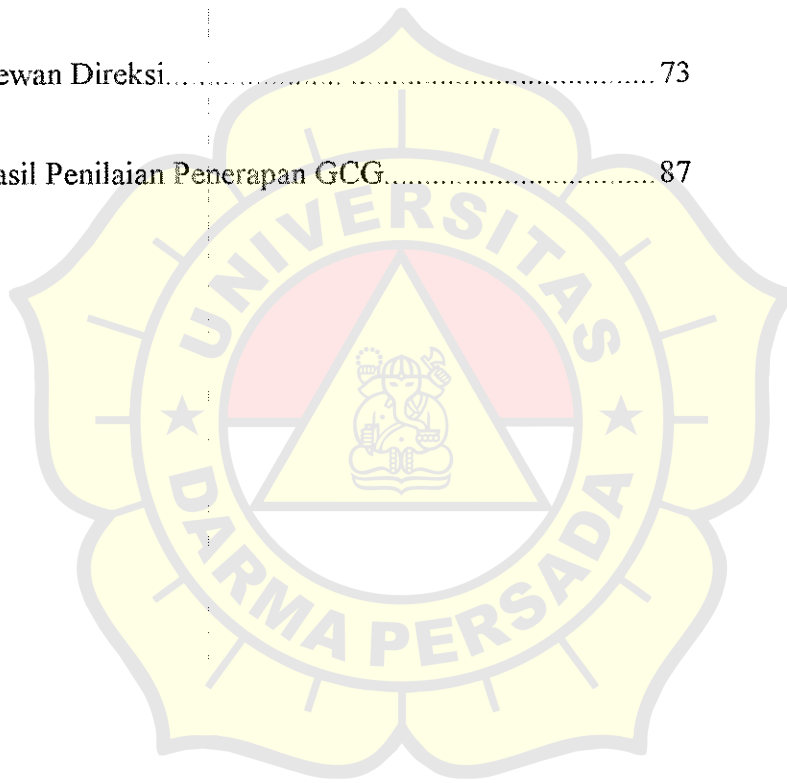
JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Komite Audit.....	14
1. Definisi Komite Audit.....	14
2. Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	15
3. Pembentukan Komite Audit.....	18
4. Pedoman Kerja Komite Audit.....	20
2.2 Dewan Komisaris.....	23
1. Definisi Komisaris.....	24
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Komisaris.....	24
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris.....	27

2.3 Dewan Direksi.....	28
1. Definisi Direksi.....	28
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi.....	29
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi.....	30
2.4 <i>Good Corporate Governance</i>	33
1. Definisi <i>Good Corporate Governance</i>	33
2. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	34
3. Tujuan dan Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	40
4. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada BUMN.....	42
2.5 peranan Komite Audit Dalam Pengawasan Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	45
2.6 Kerangka Pemikiran.....	48
2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
3.2 Jenis dan Sumber data.....	52
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	53
1. Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>).....	53
2. Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>).....	53
3.4 Analisa Data.....	54
3.5 Definisi Variabel Operasional.....	54
1. Komite Audit.....	55
2. <i>Good Corporate Governance</i>	56
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	57

4.1 Profil PT Kimia Farma (Persero) Tbk.....	57
1. Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan.....	57
2. Profil Saham.....	59
3. Anak Perusahaan.....	60
4. Bidang dan Kegiatan Usaha.....	65
5. Struktur Organisasi.....	70
4.2 Sejarah PT Kimia Farma (Persero) Tbk.....	79
4.3 Analisa Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di PT Kimia Farma (Persero) Tbk.....	80
4.4 Analisa Peran Komite Audit dalam Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di PT Kimia Farma (Persero) Tbk.....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	49
TABEL 3.1 Jadwal Penelitian.....	52
TABEL 4.1 Komposisi Pemegang Saham.....	60
TABEL 4.2 Susunan Dewan Komisaris.....	71
TABEL 4.3 Susunan Dewan Direksi.....	73
TABEL 4.4 Laporan Hasil Penilaian Penerapan GCG.....	87



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Kerangka Berpikir.....48



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Sehingga perusahaan-perusahaan dituntut mengambil langkah komprehensif terhadap aset-asetnya agar dapat menghasilkan profit berbentuk pemasukan kas sehingga memiliki nilai tambah (*value added*). Semua perusahaan BUMN maupun privat swasta yang terdaftar di bursa saham, sebagai tulang punggung perekonomian nasional diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan *corporate governance* yang efektif.

Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah

satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005).

Di Indonesia, menurut Yusuf (2007) kesadaran akan pentingnya *good corporate governance* mulai di rasakan pada saat negara ini dihantam oleh krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menyebabkan perkembangan perekonomian Indonesia mengalami stagnansi bahkan kemunduran.

Gunarsih (2002) mengungkapkan bahwa isu *good corporate governance* muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan (*agency theory*). *Agency theory* menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (pengelola/manajemen).

Kajian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi. Kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris. Ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan. Keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal. Dan kelima, ketidak memadainya pengawasan oleh para kreditor. Tantangan terkini yang dihadapi masih belum dipahami secara luas prinsip-prinsip dan praktek *good corporate governance* oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya (Daniri, 2005).

Komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah rating implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh *Standard & Poor*, *CLSA*, *Pricewaterhouse Coopers*, *Moody's Morgan*, and *Calper's*. Kajian *Pricewaterhouse Coopers* yang dimuat di dalam *Report on Institutional investor Survey (2002)* menempatkan Indonesia di urutan paling bawah bersama China dan India dengan nilai 1,96 untuk transparansi dan keterbukaan. Jika dilihat dari ketersediaan investor untuk memberi premium terhadap harga saham perusahaan publik di Indonesia, hasil survey tahun 2002 menunjukkan kemajuan dibandingkan hasil survey tahun 2000. Pada tahun 2000 investor bersedia membayar premium 27%, sedang di tahun 2002 hanya bersedia membayar 25% saja. Hal ini menunjukkan persepsi investor terhadap resiko tidak dijalkannya GCG, menjadi lebih baik. Secara keseluruhan urutan teratas masih ditempati oleh Singapura dengan skor 3,62, Malaysia dan Thailand mendapat skor 2,62 dan 2,19.

Laporan tentang GCG oleh CLSA (2003), menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum, 2,5 untuk mekanisme institusional dan budaya *corporate governance*, dan dengan total 3,2. Meskipun skor Indonesia di tahun 2004 lebih baik dibandingkan dengan 2003, kenyataannya, Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di antara Negara-negara Asia. Faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya *corporate governance* yang masih berada di titik paling rendah di antara Negara-negara lain yang sedang tumbuh di Asia. Penilaian yang dilakukan oleh CLSA didasarkan pada faktor eksternal dengan bobot 60% dibandingkan faktor internal yang hanya diberi

bobot 40% saja. Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi GCG di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penegakan yang lebih nyata lagi.

Corporate Governance memiliki tiga hal penting yang menjadi sorotan dalam penerapannya, yaitu semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi masalah keagenan, adanya skandal keuangan yang menyentak dunia bisnis, dan keinginan perusahaan untuk go global.

Perhatian terhadap *corporate governance* dipicu oleh skandal spektakuler seperti *Enron*, *Worldcom*, *Tyco*, *London & Commonwealth*, *Poly Peck*, *Maxwell*, dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards*.

Kasus seperti *Enron*, yang mencuat pada tahun 2001 dimana CEO-nya menghadapi dakwaan merupakan contoh dari salah satu kasus bagaimana *Bad Governance* yang dilakukan oleh manajemen puncak suatu perusahaan, yang antara lain berupa manipulasi data laporan keuangan. Kasus lainnya yang juga merugikan investor yang dianggap sebagai kejahatan terbesar atas otoritas di Amerika karena manipulasi keuangannya yaitu, *American International Group Inc* (AIG). Di Indonesia juga terdapat kasus-kasus serupa, misalnya kasus manipulasi laporan keuangan perusahaan berupa *overstatement* atas penyajian laporan keuangan, kerjasama antara pihak internal perusahaan

seperti direksi atau komisaris dengan pihak eksternal seperti kantor akuntan publik.

Skandal-skandal di bidang keuangan tersebut menunjukkan betapa pentingnya *Corporate Governance* diterapkan oleh perusahaan. Kerjasama ilegal muncul sebagai akibat gagalnya atau tidak adanya *Corporate Governance* di perusahaan yang mengakibatkan organ perusahaan tidak menjalankan peran sebagaimana seharusnya (Thornburgh, 2004).

Seiring dengan berkembangnya perusahaan, maka kegiatan dan masalah yang dihadapi akan semakin kompleks sehingga semakin sulit untuk mengawasi kegiatan operasi perusahaan. Masalah internal yang muncul dalam organisasi, merupakan tanda bahwa fungsi tidak dilaksanakan secara taat dan konsisten sehingga dampaknya tata kelola perusahaan tidak dilaksanakan secara sehat. Mengatasi hal itu, salah satu fungsi yang harus diberdayakan secara konsisten adalah fungsi pengawasan yang dapat memicu terlaksananya pengendalian risiko yang sehat.

Sistem *corporate governance* yang baik seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan kreditor. Perlindungan ini dapat dilakukan lewat mekanisme dari dalam perusahaan (*monitoring dan internal control*) maupun lewat mekanisme dari luar. Dua bentuk mekanisme eksternal yang penting adalah bahwa sistem *corporate governance* tersebut terdiri dari :

- a. Berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah dan stakeholders dan
- b. Berbagai mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung menegakan peraturan-peraturan tersebut.

Keberadaan komite audit telah diakui secara internasional sebagai elemen penting di dalam pengelolaan perusahaan yang baik, keberadaan komite audit merupakan suatu persyaratan untuk listed di NYSE (*New York Stock Exchange*) sejak akhir 1970. Di beberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan komite audit berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar dibursa efek (*Task Force Komite Audit Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2003*).

Komite audit sangat memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian dan karenanya komite audit perlu mendapat perhatian dari manajemen dan dewan komisaris. Sejak tahun 2000 BAPEPAM telah menetapkan keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan, minimal 3 orang. Komite audit di perusahaan dipandang sebagai persyaratan mekanisme pasar, dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing serta sistem pengendalian yang lainnya, sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap berjalan secara optimal dalam sistem ekonomi pasar. Oleh karena itu keberadaan komite audit untuk saat ini telah diterima sebagai bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Effendy (2005).

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang komite audit, baru dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2003, dimana Bapepam mengeluarkan Keputusan Ketua Bapepem No.Kep-41/PM/2003, yang kemudian dituangkan lebih rinci dalam peraturan Bapepam No.IX.I.5 Tentang pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite

Audit (Selanjutnya disebut sebagai peraturan Bapepam No.IX.I.5), yang mewajibkan perusahaan terbuka untuk memiliki komite audit selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2004.

Peraturan Bapepam tersebut mengadopsi *international best practices* diantaranya mengenai independensi, tugas dan tanggungjawab, struktur serta persyaratan keanggotaan komite audit. Komite Audit bertugas :

- a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
- c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Komite Audit merupakan sebuah fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia, Salah satu perusahaan Korea, Samsung,

mendirikan Komite Audit pada tahun 2000. Komite Audit di dalam perusahaan Samsung adalah sebuah komite yang bertugas di bawah Direksi yang mengawasi dan mendukung manajemen agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan melalui *checks and balances*. Komite Audit terdiri dari tiga directors (direktur), lebih dari dua pertiga di antaranya harus berasal dari independent direktur. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan, Komite Audit berwenang untuk :

- a. mengaudit usaha bisnis Perusahaan
- b. meminta laporan tentang status usaha Perseroan dan menyelidiki aset perusahaan.
- c. menerima laporan dari Direksi
- d. menyelidiki anak perusahaan.
- e. meminta untuk menghentikan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan.
- f. meminta pertemuan rapat umum pemegang saham.
- g. merekomendasikan kandidat auditor eksternal.

Perusahaan memberikan hak kepada anggota Komite Audit dalam rangka menjaga independensi dan *check-and-balance* dengan peraturan:

- a. Beritikad baik
- b. Menyelidiki dan melaporkan kepada rapat umum pemegang saham
- c. Menyelidiki dan melaporkan kepada Dewan
- d. Mempersiapkan Laporan Hasil Audit
- e. Mempersiapkan dan mengirim Laporan Audit
- f. Bekerja di bawah undang-undang Audit Eksternal Perusahaan Efek.

Komite Audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian dalam perusahaan. Sehingga diperlukan suatu mekanisme komunikasi antara Komite Audit dengan berbagai pihak, dengan kata lain semakin lancar komunikasi akan semakin meningkat kinerja dari pengendalian perusahaan. Hal ini sejalan dengan kerangka GCG sendiri yang memiliki kandungan permintaan *disclosure* (pengungkapan) informasi yang kuat. Selain itu peran dan tanggung jawab Komite Audit dalam segi *Corporate Governance* adalah berupa pengawasan terhadap proses *corporate governance* di perusahaan, memastikan bahwa manajemen puncak mempromosikan budaya yang kondusif bagi tercapainya *good corporate governance*, memonitor kepatuhan terhadap *code of conduct* perusahaan, memahami semua permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun non-keuangan perusahaan (Alijoyo, 2004).

Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ini Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawab pengawasannya, yang meliputi penelaahan atas laporan tahunan auditan dan laporan keuangan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, serta pengawasan atas proses audit. Dalam kapasitasnya, Komite Audit bertanggung jawab untuk membuka dan memelihara/menjaga komunikasi antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, unit audit internal, akuntan independen dan manajer keuangan. Dilihat dari sisi keanggotaan, Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Komite Audit juga membantu Direksi yang memiliki tanggung jawab dalam hal pengawasan. *Auditing and Assurance Standards Boards* pada bukunya yang berjudul *Audit Committees: A Guide to Good Practice* menyebutkan bahwa Direksi memiliki tanggung jawab dalam mengawasi perusahaan yang di atasnamakan oleh pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Perusahaan yang memiliki jumlah direksi lebih banyak pada umumnya membentuk komite dari beberapa direksi agar dapat menggunakan waktunya dengan baik dan membantu dalam hal penanganan untuk area yang kompleks atau khusus seperti laporan dan audit keuangan, *compliance*, manajemen risiko, keberlangsungan, kesehatan, dan keamanan perusahaan. Komite juga membuat rekomendasi untuk suatu tindakan kepada keseluruhan direksi, dengan kata lain menyimpan sejumlah tanggung jawab untuk pengambilan keputusan.

Komite Audit memiliki peran penting untuk membantu direksi dalam hal pemenuhan GCG, Selain membantu dalam hal pengawasan perusahaan. Direksi sendiri dibutuhkan untuk menyatakan laporan keuangan dan catatan-catatan yang mengikuti standar akuntansi serta memberikan pandangan yang benar dan adil terhadap posisi dan performa keuangan dari sebuah perusahaan. Komite Audit harus bekerja secara independen terhadap pihak manajemen dan bebas dari segala bentuk pengaruh yang negatif. Anggota dari Komite Audit harus tidak memiliki kekuasaan eksekutif, fungsi manajemen, atau pendelegasian tanggung jawab entitas keuangan.

Good corporate governance selalu diinterpretasikan sebagai sebuah perusahaan dengan tingkat transparansi yang tinggi. Komite audit bagian dari

internal corporate governance sangat memegang peranan penting dalam memonitoring mekanisme dan memperbaiki kualitas informasi antara manager (agent) dan pemilik (prinsipal) perusahaan melalui penyampaian pelaporan keuangan yang relevan dan *voluntary disclosure*, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memaksimalkan profit bagi *shareholders* sekaligus.

Kasus-kasus yang terjadi pada beberapa BUMN di Indonesia terjadi karena penerapan proses *good corporate governance* belum dipahami dan diterapkan sepenuhnya. Namun PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebagai salah satu BUMN terkemuka telah menjadikan laporan GCG menjadi salah satu kewajiban utama yang harus disajikan setiap tahunnya. Dengan visi menjadi korporasi bidang kesehatan terintegrasi dan mampu menghasilkan pertumbuhan nilai yang berkesinambungan melalui konfigurasi dan koordinasi bisnis yang sinergis. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sudah menjadi bagian dari PT Kimia Farma sejak PT Kimia Farma berdiri dan terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu.

PT Kimia Farma beranggapan bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam menjalankan bisnis di industri farmasi yang semakin kompetitif. Manfaat yang dapat diambil dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi PT Kimia Farma antara lain memperkuat posisi daya saing PT Kimia Farma, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif, dan meningkatkan kepercayaan *shareholders* dan publik.

PT Kimia Farma sejak tahun 2011 telah melakukan program transformasi dan mengubah visi perusahaan dari jaringan ritel farmasi menjadi jaringan layanan kesehatan terkemuka dan mampu memberikan solusi kesehatan masyarakat di Indonesia. Untuk itu PT Kimia Farma di samping meningkatkan pengelolaan dan pengembangan apotek, juga mengembangkan klinik kesehatan, mengembangkan laboratorium klinik melalui anak perusahaan PT Kimia Farma Diagnostika, dan mengembangkan layanan optik serta layanan kesehatan lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan diatas, penulis tertarik untuk membuat penulisan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan yaitu mengenai penerapan atau praktik *corporate governance* pada perusahaan khususnya pada perusahaan milik pemerintah, dengan judul skripsi yang diambil penulis “ **Peran Komite Audit dalam Pengawasan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah pada PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

“Apakah Komite Audit Berperan dalam pengawasan penerapan prinsip *good corporate governance*?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komite Audit dalam mengawasi atas penerapan prinsip *good corporate governance*.

b. Manfaat

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pembaca lainnya ataupun dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut sehubungan dengan masalah yang dibahas dan dapat memperluas wawasan pembaca tentang peranan komite audit dalam pengawas penerapan prinsip *good corporate governance*.

1) Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengetahuan tambahan mengenai teori dan praktek yang sesungguhnya mengenai fungsi dan pengaruh audit internal dalam menunjang proses *corporate governance* pada perusahaan milik pemerintah yang sudah *go public*.

2) Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan dan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen dalam meningkatkan informasi tentang peran komite audit dalam pengawasan penerapan prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan.